

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2003. *Hukum Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Cet.III. Surabaya : Sinar Grafika.
- , 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Arief Wahyudi Hertanto dan Arief Nurul Wicaksono. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum*. Jakarta : Pelita.
- Asep N.Mulyana. 2018. *Business Judgement Rule : Praktek Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta : PT.Grasindo.
- A.Y.Suryanajaya. 2011. *Penyelesaian Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Publik Teori dan Praktek*. Jakarta : CV.Eko Jaya.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Analisis Yuridis dan Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta : UII Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1992. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta : UI.
- , 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya.

- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana (Prenada Media Grup).
- Brenda Grantland. 2009. *Asset Forfeiture : Rules and Procedures*. Forfeiture Endangers American Rights (FEAR) : Washington D.C.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : PT.Sinar Bandung.
- Eri Satriana dan Dewi Kania Suguharti. 2019. *Asset Recovery dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional*. Bandung : Keni Media.
- Green Mind Community. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta : Total Media.
- Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.Muhammad Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Prenada Media.
- Hernol Ferry Makawimbang. 2014. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan hukum progresif*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet. III*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Marwan Effendi. 2014. *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciputat : Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Mia Amiati Iskandar. 2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC dan UNCAC 2003*, Jakarta : Referensi (GP Press Group).

- Moh.Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok : PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Djafar Saidi. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- M.Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Yusuf. 2013. *Miskinkan Koruptor Pembuktian Terbalik Solusi Jitu Yang Terabaikan*. Jakarta : Pustaka Juanda Tigalima.
- , 2013. *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas (PT.Kompas Media Nusantara).
- O.Notohamidjojo. 1975. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : BPK Gunung Agung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum. Cet.VI*. Jakarta : Kencana.
- Philipus M.Hadjon. 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Purwaning M.Yanuar. 2015. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Pusat Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. (Departemen Pendidikan nasional). Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ratna Nurul Afifah. 2010. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Resmen. 2023. *Menjerat Suap di Sektor Privat*. Jakarta : PT.Jagat Pariwara Media Citra.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.

- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.
- Salim dan Erlies Septiani Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*. Depok : RajaGrafindo.
- Salman Luthan, 2012, *Sinergitas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Pembaruan Peradilan : dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Komisi Yudisial.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni.
- , 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Tim Penyusun. 2023. *Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*. Jakarta.
- Theo Hujbers. 1990. *Filsafat Hukum*. Jogjakarta : Kanisius.
- Theodorus M. Tuanakotta. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Wiryo Projo Djokoro. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Bandung : Eresco.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Grasindo. anggota IKAPI.
- Yudi Kristiana. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta : Thafamedia.

Jurnal

- Marfuatul Latifah. 2015. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum. Vol.6.
- Muwahid. 2017. *Metode penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim dalam upaya mewujudkan hukum yang responsif*. Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 7 No.1.
- M.Zulfa Aulia. 2018. *Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo : Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*, Undang : Jurnal Hukum. Volume 1 No.1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang Undang 1946. *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Jakarta.
- Indonesia. Undang Undang 1981. *Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.
- Indonesia. Undang Undang 1999. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Indonesia. Undang Undang 2001. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Indonesia. Undang Undang 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Indonesia. Undang Undang 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Indonesia. Undang Undang 2010. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta.

Draft Net per 30 November 2022. *Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Peraturan Kejaksaan RI

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 1/P-TPPU/2021/PN.Bir, tanggal 9 November 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 519/Pdt.G/2022/PN.Dps, tanggal 3 Juli 2023.

Pidato Kenegaraan

Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2019.

Sumber Internet

Premita Fifi Widhiati. *Anti-illicit Enrichment*. diakses 12 Agustus 2023.
<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/viw/433935>